

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Manajemen Laba**

###### **2.1.1.1 Pengertian Manajemen Laba**

Menurut Sulistyanto (2012: 48) bahwa :

*“Earning managemen is the process of taking deliberate steps within the constrain of generally accepted accounting principles to bring about desired level of reported earnings”.*

Menurut *National Association of Fraud Examiners* (1993) dalam Sulistyanto (2012: 49) bahwa :

*“Earnings management is the intentional, deliberate, misstatement or omission of material facts, or accounting data, which is misleading and, when considered with all the information made available, would cause the reader to change or alter his or judgement or decision”.*

Menurut Sulistyanto (2012: 50) bahwa :

“Manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan, untuk menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan serta mempengaruhi hasil kontak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu”.

### 2.1.1.2 Motivasi Manajemen Laba

Ada tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dipergunakan untuk menguji perilaku etis seseorang dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan dalam Sri Sulistyanto (2012:63) bahwa :

1. *“Bonus Plan Hypothesis*  
Menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung memilih menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan manajerial. Agar selalu bisa mencapai tingkat kinerja yang memberikan bonus, manajer mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan sehingga bonus itu selalu didapatnya setiap tahun. Hal inilah yang mengakibatkan pemilik mengalami kerugian ganda, yaitu memperoleh informasi palsu dan mengeluarkan sejumlah bonus untuk sesuatu yang tidak semestinya.
2. *Debt Equity Hypothesis*  
Menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi dan cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperoleh. Keuntungan tersebut berupa permainan laba agar kewajiban utang piutang dapat ditunda untuk periode berikutnya sehingga semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya memperoleh informasi yang keliru dan membuat keputusan bisnis menjadi keliru. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam mengalokasikan sumber daya.
3. *Political Cost Hypothesis*  
Menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat memperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah, seperti undang-undang perpajakan, apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya, manajer akan mempermainkan laba agar kewajiban pembayaran tidak tertalalu tinggi sehingga alokasi laba sesuai dengan kemauan perusahaan”.

### 2.1.1.3 Pola Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2012:177) pola manajemen laba antara lain:

1. “Penaikan laba (*income increasing*)  
Pola penaikan laba (*income increasing*), merupakan upaya perusahaan untuk mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan yang sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya sesungguhnya.
2. Penurunan laba (*income decreasing*)  
Pola penurunan laba (*income decreasing*), merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya sesungguhnya.
3. Perataan laba (*income smoothing*)  
Pola perataan laba (*income smoothing*), merupakan upaya perusahaan mengatur agar labanya relatif sama selama beberapa periode. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan atau biaya sesungguhnya.”

### 2.1.1.4 Teknik Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2012:34) ada empat cara yang digunakan manajer untuk melakukan manajemen laba yaitu :

1. “Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih  
Upaya ini dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat pendapatan periode-periode yang akan datang atau pendapatan yang secara pasti belum dapat ditentukan kapan dapat terealisasi sebagai pendapatan periode berjalan (*current revenue*). Hal ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan lebih besar daripada pendapatan sesungguhnya. Meningkatnya pendapatan ini membuat laba periode berjalan juga menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya. Akibatnya kinerja perusahaan periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Meskipun hal ini

akan mengakibatkan pendapatan atau laba periode-periode berikutnya akan menjadi lebih rendah dibandingkan pendapatan atau laba sesungguhnya.

2. Mencatat pendapatan palsu

Upaya ini dilakukan manajer dengan mencatat pendapatan dari suatu transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi sehingga pendapatan ini juga tidak akan pernah terealisasi sampai kapan pun. Upaya ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya, akibatnya kinerja perusahaan periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan dengan mengakui pendapatan palsu sebagai piutang yang pelunasan kasnya tidak akan pernah diterima.

3. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat dan lambat

Upaya ini dapat dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat biaya periode-periode yang akan datang sebagai biaya periode berjalan (*current cost*). Upaya semacam ini membuat biaya periode berjalan menjadi lebih besar daripada biaya sesungguhnya. Meningkatnya biaya ini membuat laba periode berjalan juga akan menjadi lebih kecil daripada biaya sesungguhnya. Semakin kecil biaya ini membuat laba periode berjalan akan menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya, akibatnya membuat kinerja perusahaan untuk periode berjalan akan seolah-olah lebih baik atau besar bila dibandingkan dengan kinerja perusahaan yang sesungguhnya.

4. Tidak mengungkapkan semua kewajiban

Upaya ini dapat dilakukan manajer dengan menyembunyikan seluruh atau sebagian kewajibannya sehingga kewajiban periode berjalan menjadi lebih kecil daripada kewajiban sesungguhnya”.

#### **2.1.1.5 Faktor yang mempengaruhi Manajemen Laba**

Manajemen laba dapat terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda antara prinsipal (pemilik perusahaan) dengan agen (pengelola perusahaan). Hal ini terjadi karena pengelola (manajer) mempunyai informasi mengenai perusahaan yang tidak dimiliki oleh pemegang saham dan dipergunakannya untuk meningkatkan utilitasnya.

Manajemen laba sebagai suatu fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang mendorong terjadinya fenomena tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen laba, yaitu sebagai berikut:

Menurut Dul Muid (2009) faktor yang mempengaruhi manajemen laba yaitu:

1. “Kepemilikan Insitutional
2. Proporsi Dewan Komisaris Indenpenden
3. Ukuran Dewan Komisaris
4. Keberadaan Komite Audit
5. Ukuran Perusahaan”.

Menurut Rice & Agustina (2012) faktor yang mempengaruhi manajemen laba yaitu:

1. *“Earning Power*
2. *Leverage*
3. Kepemilikan Institusional
4. Nilai Perusahaan”.

Sedangkan menurut Putu Putri Suriyani,dkk (2015) faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba yaitu:

1. “Kepemilikan Institusional
2. Dewan Komisaris
3. Persentase Saham Publik
4. Komite Audit
5. *Leverage*”.

## **2.1.2 Manajemen Laba Akrua**

### **2.1.2.1 Pengertian Manajemen Laba Akrua**

Akrual secara teknis merupakan selisih laba dengan kas. Akrua merupakan metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan.

Menurut Bustanul Faoziyah (2012) bahwa :

“Manajemen laba akrual dilakukan pada akhir periode ketika manajer mengetahui laba sebelum direkayasa sehingga dapat mengetahui berapa besar rekayasa yang diperlukan agar target laba tercapai. Pada dasarnya, manajemen laba akrual dibatasi oleh GAAP dan rekayasa ini dapat terdeteksi oleh auditor, investor ataupun badan pemerintah sehingga dapat berdampak pada harga saham bahkan menyebabkan kebangkrutan atau kasus hukum”.

Menurut Sri Sulistyanto (2012:161) bahwa :

“Manajemen laba akrual digunakan untuk mengakui biaya yang sudah menjadi kewajiban maka perusahaan tidak perlu memperhatikan waktu dan pengeluaran kas. Artinya biaya dapat diakui pada periode tertentu walaupun pengeluaran kas telah terjadi pada periode sebelumnya. Atau sebaliknya, biaya baru akan diakui periode yang akan datang meski pengeluaran kas telah dilakukan periode sebelumnya. Selain itu, perusahaan juga bisa mengeluarkan biaya yang merupakan komponen alokasi harga pokok aktiva yang dimilikinya pada saat barang terjual”.

Menurut Sri Sulistyanto (2012:161) bahwa :

“Metode pencatatan ini membuat perusahaan dapat menunda pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode berikutnya, meskipun kas telah diterima. Artinya perusahaan dapat mengakui pendapatan pada periode tertentu walaupun kas baru akan diterima pada periode yang akan datang. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai account akrual dalam laporan keuangan, seperti piutang dagang, pendapatan diterima dimuka, biaya cadangan, biaya depresi, dan lain-lain”.

Menurut Sri Sulistyanto (2012:164) bahwa :

“*Discretionary Accrual* merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi. Metode *discretionary accrual* yang dipakai manajer perusahaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Misalnya kebebasan menentukan estimasi dan memilih metode depresiasi aktiva tetap, menentukan estimasi presentase jumlah piutang tak tertagih, serta memilih metode penentuan jumlah persediaan”.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba akrual adalah rekayasa yang tidak memiliki pengaruh terhadap arus kas secara langsung. Manajemen laba akrual dilakukan pada akhir periode ketika manajer

mengetahui laba sebelum direkayasa sehingga dapat mengetahui berapa besar rekayasa yang diperlukan agar target laba tercapai.

### **2.1.2.2 Komponen Manajemen Laba Akrua**

Menurut Sri Sulistyanto (2012:161) untuk menentukan seberapa besar kecilnya aktivitas manajemen laba yang direkayasa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. "*Discretionary accrual* merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi. Ada beberapa metode yang bisa dipakai manajer perusahaan untuk merekayasa besar kecilnya *discretionary accrual* ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya, misalnya kebebasan menentukan estimasi presentase jumlah piutang tak tertagih, memilih metode penentuan jumlah persediaan, dan sebagainya.
2. *Nondiscretionary accrual* merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima secara umum, misalnya metode depresiasi dan penentuan persediaan yang dipilih harus mengikuti metode yang diakui dalam prinsip akuntansi”.

### **2.1.2.3 Manfaat Akrua**

Dalam studi no. 14 yang diterbitkan oleh IFAC-*Public Sector Committee*, laporan keuangan yang disajikan dengan basis akrual memungkinkan pengguna laporan untuk:

1. “Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas.
2. Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas.
3. Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada atau melakukan bisnis dengan suatu entitas”.

### 2.1.2.4 Model Empiris Manajemen Laba Akrua

Secara umum ada tiga kelompok model empiris manajemen laba yang diklarifikasi atas dasar basis pengukuran yang digunakan, yaitu model yang berbasis akrual agregat (*aggregate accruals*), akrual khusus (*specific accruals*), dan distribusi laba (*distribution of earnings*) (Sulistyanto, 2012:7) :

1. Model berbasis akrual merupakan model yang menggunakan *discretionary accruals* sebagai proyeksi manajemen laba. Model manajemen laba ini dikembangkan oleh Healy (1985), DeAnglo (1986), Jones (1991), serta Dechow, Sloan, dan Sweeney (1995).
2. Model yang berbasis *specific accruals*, yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proyeksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan keuangan tertentu dari industri tertentu pula, Model ini dikembangkan oleh McNichols dan Wilson, Petroni, Beaver dan Engel, Beneish, serta Beaver dan McNichols.
3. Model *distribution of earnings* dikembangkan oleh Budgtahler dan Dichev, Degeorge, Patel, dan Zeckhauser, serta Myers dan Skinner.

### 2.1.2.5 Indikator Manajemen Laba Akrua

Menurut Healy dan De Anglo (Scott, 1997), total akrual terdiri dari *discretionary accruals* dan *non discretionary accruals*. Total akrual digunakan sebagai indikator, sebab *discretionary accruals* (DAC) sulit untuk diamati, karena ditentukan oleh kebijakan masing-masing manajer.

$$DAC_{it} = \left( \frac{TAC_{it}}{Sales_{it}} \right) - \left( \frac{TAC_{pd}}{Sales_{pd}} \right)$$

#### Keterangan :

$DAC_{it}$  = Discretionary Accruals Periode Test

$TA_{it}$  = Total Accruals Periode Test



$Sales_{it}$  = Penjualan Periode Test

$TA_{t-1}$  = Total Accruals Periode Dasar

$Sales_{t-1}$  = Penjualan Periode Dasar

### 2.1.3 Manajemen Laba Riil

Manajemen laba riil merupakan manajemen yang dilakukan oleh manajemen melalui aktivitas perusahaan sehari-hari selama periode akuntansi. Kegiatan manajemen laba riil dimulai dari praktek operasional normal, yang dimotivasi oleh manajer yang berkeinginan untuk mengelabui bahkan menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.

#### 2.1.3.1 Pengertian Manajemen Laba Riil

Menurut Roychowdhury (2006) mendefinisikan laba sebagai berikut:

*“Management actions that deviate from normal business practice, undertaken with the primary objective of meeting certain earnings thresholds.”*

Menurut Sulistiawan (2011: 70) manajemen laba aktivitas riil adalah :

“Manajemen laba melalui aktivitas riil merupakan rekayasa yang dilakukan melalui permainan angka laba yang berasal dari kegiatan bisnis normal atau yang berhubungan dengan kegiatan operasional, misalnya menunda kegiatan promosi produk atau mempercepat penjualan dengan memberi diskon besar-besaran.”

Menurut Suwardjono (2008: 136) manajemen laba aktivitas riil adalah:

“penyimpangan dari praktek operasional perusahaan yang normal”

Menurut Bustanul (2012) bahwa :

“Manajemen laba riil merupakan rekayasa yang dilakukan oleh manajemen melalui aktivitas perusahaan sehari-hari selama periode akuntansi berjalan dengan tujuan tertentu yaitu memenuhi target laba tertentu atau untuk menghindari kerugian”.

Menurut Heni Yusnita (2015) bahwa :

“Praktek operasi yang dilakukan dengan praktek-praktek operasi normal, dimotivasi oleh keinginan manajemen untuk memberikan pemahaman yang salah kepada *stakeholders* agar *stakeholders* percaya bahwa tujuan pelaporan keuangan tertentu telah dicapai sesuai praktek operasi normal perusahaan. Perbedaan yang dilakukan ini tidak memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan, meskipun dengan tindakan ini memungkinkan manajer mencapai tujuan pelaporan”.

### 2.1.3.2 Teknik Manajemen Laba Riil

Menurut Roychowdhury (2006) manajemen laba riil dapat dilakukan

dengan tiga cara yaitu:

- a. “Rekayasa penjualan  
Rekayasa penjualan ini merupakan usaha untuk meningkatkan penjualan secara temporer dalam periode tertentu dengan menawarkan diskon harga produk secara berlebihan atau memberikan persyaratan kredit yang lebih lunak. Strategi ini dapat meningkatkan volume penjualan dan laba periode saat ini, dengan mengasumsikan marginnya positif. Namun, pemberian diskon harga dan syarat kredit yang lebih lunak akan menurunkan aliran kas periode saat ini.
- b. Produksi yang berlebihan  
Untuk meningkatkan laba, manajer perusahaan dapat memproduksi lebih banyak dari pada yang diperlukan dengan asumsi bahwa tingkat produksi yang lebih tinggi akan menyebabkan biaya tetap per unit produk lebih rendah. Strategi ini dapat menurunkan biaya barang terjual (*cost of goods sold*) dan meningkatkan laba operasi.
- c. Penurunan beban-beban diskresionari  
Perusahaan dapat menurunkan *discretionary expenditures* seperti beban penelitian dan pengembangan, iklan dan penjualan, administrasi dan umum terutama dalam periode pengeluaran tersebut tidak langsung menyebabkan pendapatan dan laba. Strategi ini dapat meningkatkan laba dan arus kas periode saat ini, namun dengan risiko menurunkan arus kas periode mendatang”.

Ketiga cara manajemen laba riil di atas biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan kinerja yang buruk dengan cara memanajemen laba riil tersebut terutama untuk mencapai laba sedikit di atas nol. Dengan ketiga cara

di atas, perusahaan-perusahaan yang diduga (*suspect*) melakukan manajemen laba riil akan mempunyai *abnormal cash flow operations* (CFO) dan *abnormal production cost* yang lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan lain serta *abnormal discretionary expenses* yang lebih kecil.

Berdasarkan survey tersebut, Roychowdhury (2006) menunjukkan para eksekutif keuangan lebih memilih untuk merekayasa laba melalui aktivitas-aktivitas riil daripada aktivitas akrual. Hal ini disebabkan oleh:

1. “Manajemen akrual cenderung membuat para auditor atau regulator melakukan pemeriksaan dengan cepat daripada keputusan-keputusan tentang aktivitas riil atau produksi yang dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa baik auditor maupun regulator kurang memberikan perhatian terhadap aktivitas riil yang direkayasa oleh manajer, sehingga manajer memiliki kesempatan untuk memanfaatkan peluang ini dalam mencapai target laba.
2. Hanya berdasar pada manajemen akrual saja akan membawa resiko karena pengelolaan laba dengan mengandalkan *discretionary accrual* hanya dapat dilakukan pada akhir tahun. Akan tetapi, strategi ini menimbulkan resiko yaitu jika jumlah laba yang perlu direkayasa lebih besar daripada *discretionary accrual* yang digunakan manajer, sehingga kemampuan manajer dalam manajemen laba terbatas, akibatnya target laba tidak dapat dicapai jika hanya menggunakan *discretionary accrual* pada akhir tahun. Manajer dapat mengurangi resiko ini dengan merekayasa aktivitas riil selama tahun berjalan.

Kegiatan riil dianggap lebih baik daripada hanya kegiatan berbasis akrual. Indikasi keterlibatan manajemen perusahaan dengan manajemen laba riil dapat ditunjukkan oleh nilai abnormal kegiatan. Pengukuran nilai abnormal dari aktivitas adalah deviasi antara nilai akrual dan nilai aktivitas yang diharapkan.

### 2.1.3.3 Indikator Manajemen Laba Riil

Pengukuran manajemen laba riil mengacu pada pengukuran yang dikembangkan oleh Roychowdhury (2006). Pengukuran dilakukan dengan mengestimasi setiap industri setiap tahun pada masing-masing proksi. Adanya manajemen laba riil dinilai dengan arus kas operasi abnormal negatif dan apabila arus kas operasi abnormal positif berarti tidak terdapat manajemen laba riil.

$$\frac{CFO_{it}}{TA_{it-1}} = a_0 + a_1 \left[ \frac{1}{TA_{t-1}} \right] + a_2 + \left[ \frac{Sales_{it}}{TA_{t-1}} \right] + \left[ \frac{\Delta Sales_{it}}{TA_{t-1}} \right]$$

#### Keterangan :

$CFO_{it}$  = Arus kas kegiatan operasi perusahaan  $a$  pada tahun  $t$

$TA_{it-1}$  = Total asset perusahaan  $a$  1 tahun sebelum tahun  $t$

$Sales_{it}$  = Penjualan perusahaan  $a$  pada tahun  $t$

$\Delta Sales_{t-1}$  = Perubahan penjualan pada tahun  $t$  terhadap  $t-1$

Manajemen laba riil dari model di atas akan diregresikan secara *time series* untuk tiap-tiap perusahaan yang masuk dalam sampel penelitian, guna mendapatkan nilai manajemen laba riil pada masing-masing perusahaan, sehingga estimasi manajemen laba riil secara spesifik (analisis level spesifik perusahaan). Nilai yang digunakan adalah residual yang didapat dari hasil regresi masing-masing perusahaan tersebut.

## 2.1.4 Corporate Social Responsibility

### 2.1.4.1 Pengertian Corporate Social Responsibility

Menurut Untung (2010:1) bahwa:

“*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.”

Menurut Rahmawati (2012:180) bahwa:

“Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum.”

Menurut ISO 26000 CSR didefinisikan sebagai:

“Tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dari para *stakeholder*, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma internasional, terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.”

Menurut lembaga *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* dalam Rusdianto (2013:7), mendefinisikan Corporate Social Responsibility sebagai:

“*Corporate social responsibility is the continuing commitment by business to behave ethical and contribute to economic development while improving the quality of life of the the workforce and their families as well as of local community and society at large*”.

Menurut Rusdianto (2013:7) bahwa :

“Konsep dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* mengandung arti bahwa organisasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri (selfish). Sehingga teralienasi dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib

melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Konsep ini menyediakan jasa bagi setiap perusahaan untuk melibatkan dirinya dengan dimensi sosial dan memberikan perhatian terhadap dampak-dampak sosial yang ada.”

Menurut Yateno (2016) bahwa :

“*Corporate Social Responsibility* merupakan tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *stakeholders* terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya. Sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang *Corporate Social Responsibility* adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya”.

Menurut Sugeng Widodo (2017) dalam penelitiannya menyatakan :

“*Corporate Social Responsibility* adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan hubungan dengan para pemangku kepentingan perusahaan dan aktivitas lingkungan, oleh karena itu perlu kesadaran dari perusahaan untuk dapat melakukan kegiatan sosial tersebut”.

#### **2.1.4.2 Pengertian Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

Menurut Pratiwi dan Djamhuri (2004) mengartikan pengungkapan sosial yaitu :

“Sebagai suatu pelaporan atas penyampaian informasi ke *stakeholders* mengenai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Hasil penelitian di berbagai negara membuktikan, bahwa laporan tahunan (*annual report*) merupakan media yang tepat untuk menyampaikan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan.”

Menurut Rakiemah (2009) Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* didefinisikan sebagai :

“Suatu proses penyediaan informasi yang dirancang untuk mengemukakan masalah seputar *social accountability*, yang mana secara khas tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan dalam media-media seperti laporan tahunan maupun dalam bentuk iklan-iklan yang berorientasi sosial.”

Menurut (Rahmawati, 2012:183) bahwa :

“Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure, corporate social reporting, social accounting*, atau *corporate social responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.”

Menurut Andreas, Desmiyawati dkk (2015) bahwa :

*“Corporate Social Responsibility disclosure is the disclosure of all information related to social responsibility activities that have been implemented by companies. Corporate Social Responsibility disclosure was measured by Corporate Social Responsibility Disclosure Index (CSRDI) which refers Global Report Initiatives (GRI) indicators.”*

#### **2.1.4.3 Faktor-faktor Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

Menurut Rusdianto (2013:44) menjelaskan ada banyak hal yang membuat perusahaan mengungkapkan CSR-nya yaitu :

1. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang terdapat dalam undang-undang.
2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi.
3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan.
4. Keinginan untuk memenuhi persyaratan pinjaman.
5. Pemenuhan kebutuhan informasi pada masyarakat.
6. Sebagai konsekuensi atas ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
7. Untuk mengukur kelompok stakeholders yang mempunyai pengaruh yang kuat.
8. Untuk mematuhi persyaratan industri tertentu.
9. Untuk mendapatkan penghargaan pelaporan tertentu.

#### **2.1.4.4 Ruang Lingkup Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

Menurut Azheri (2012:36) menyatakan ada tiga dimensi yang harus diperhatikan, sehubungan dengan ruang lingkup *Corporate Social Responsibility* yaitu :

1. "*Corporate Philantrophy* adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dimana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat berupa tanggapan langsung perusahaan atas permintaan dari luar perusahaan atau juga berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.
2. *Corporate Social Responsibility* adalah usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
3. *Corporate Policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan”.

#### 2.1.4.5 Teori yang Melandasi *Corporate Social Responsibility*

Landasan teoritis *Corporate social responsibility* terdiri dari:

##### 1. Teori Legitimasi

Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat (Nor Hadi, 2011:88).

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. Nor Hadi (2011:87) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat sumberdaya bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*).

Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu “*social contract*” (Lako, 2011:5).

##### 2. Teori Stakeholder

Bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan *stakeholder*, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholder bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi *stakeholder* (Nor Hadi, 2011:94).



Teori ini menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup-matinya suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para stakeholder atau pemangku kepentingan. Jika mampu, maka perusahaan bakal meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, serta laba. Dalam perspektif teori stakeholder, masyarakat dan lingkungan merupakan stakeholder inti perusahaan yang harus diperhatikan (Lako, 2011:5).

### 3. Teori Kontrak Sosial

Kontrak sosial muncul akibat adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian dan keseimbangan, termasuk terhadap lingkungan. Perusahaan yang merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, dimana antara keduanya saling mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan (*equality*), maka perlu kontrak sosial baik secara eksplisit maupun implisit sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang saling melindungi kepentingannya (Nor Hadi, 2011:95).

Keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak sosial secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat dimana masyarakat memberi biaya dan keuntungan untuk keberlanjutan suatu korporasi. Karena itu, Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat suka rela (Lako, 2011:6).

#### 2.1.4.6 Manfaat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Aktivitas *Corporate Social Responsibility* memiliki fungsi strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (*social security*). Dengan menjalankan *Corporate Social Responsibility*, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga harus turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan jangka panjang.

Menurut Rusdianto (2013:13) terdapat manfaat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu:

1. “Membangun dan menjaga reputasi perusahaan.
2. Meningkatkan citra perusahaan.
3. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan.
4. Mempertahankan posisi merek perusahaan.
5. Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (*capital*).
7. Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis.
8. Mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*)”.

Menurut Rusdianto (2013:13) bahwa :

“Keputusan perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* secara berkelanjutan, merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program *Corporate Social Responsibility* akan menimbulkan efek lingkaran emas yang tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, melainkan juga stakeholder. Bila *Corporate Social Responsibility* mampu dijalankan secara efektif maka dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan, melainkan juga bagi masyarakat, pemerintah dan lingkungan.”

#### **2.1.4.7 Indikator Pengungkapan Corporate Social Responsibility**

*Global Reporting Initiative* (GRI), yang merupakan panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh PBB lewat *Coalition for Environmental Economies* (CERES) dan (UNEP) pada tahun 1997. GRI merupakan organisasi non-profit yang mempromosikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. GRI menyediakan kerangka pelaporan keberlanjutan yang komprehensif bagi semua perusahaan dan organisasi yang banyak digunakan diseluruh dunia. Pedoman pengungkapan GRI terdiri dari G3, G3.1, dan G4. G3 atau yang sering dikenal dengan G 3.0 merupakan versi awal dari pedoman GRI yang terdiri dari 79 indikator dan

merupakan pedoman yang sering digunakan sampai saat ini. G3.1 merupakan versi pengembangan dari G3 yang didalamnya terkandung 84 indikator termasuk 79 indikator yang digunakan sebelumnya pada G3 dengan beberapa perubahan dan tambahan-tambahan lainnya yang dinilai lebih menyempurnakan pedoman GRI. G4 merupakan pedoman terbaru yang memiliki 91 indikator.

([www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)).

Indikator-indikator dalam *GRI Standard Disclosure G4*, terdiri dari 3 komponen:

1. Indikator Kinerja Ekonomi (*Economic Performance Indicator*)
2. Indikator Kinerja Lingkungan (*Environmental Performance Indicator*)
3. Indikator Kinerja Sosial (*Social Performance Indicators*), terdiri dari 4 aspek, yaitu:
  - Indikator Kinerja Praktek Kerja & Kelayakan Kerja (*Labor Practices & Decent Work Performance Indicator*)
  - Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (*Human Rights Performance Indicator*)
  - Indikator Kinerja Masyarakat (*Society Performance Indicator*)
  - Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk (*Product Responsibility Performance Indicator*).

**Tabel 2.1**  
**91 Indikator Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***  
**Berdasarkan GRI-G4**

KATEGORI	KODE	KETERANGAN
<b>KATEGORI EKONOMI</b>		
-Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
	EC4	Bantuan financial yang diterima dari pemerintah
-Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang diperkerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
-Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
-Praktek Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan
<b>KATEGORI LINGKUNGAN</b>		
-Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume
	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
-Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN5	Intensitas Energi
	EN6	Pengurangan Konsumsi Energi
-Air	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
	EN10	Presentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
-Keaneragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang

KATEGORI	KODE	KETERANGAN
		berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung.
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
	EN14	Jumlah total spesies dalam iucn res list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
-Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 1)
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya
-Efluen dan Limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel2 Lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan presentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi
-Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa

<b>KATEGORI</b>	<b>KODE</b>	<b>KETERANGAN</b>
	EN28	Presentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
-Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan.
-Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja
-Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
-Asesmen Pemasok Atas Lingkungan	EN32	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan Masala Lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
<b>KATEGORI SOSIAL</b>		
<b>SUB-KATEGORI : PRAKTEK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA</b>		
-Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat pengkrekrutan karyawan baru, dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender
-Hubungan Industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
-Kesehatan dan Keselamatan Kerja	LA5	Presentase total kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja

<b>KATEGORI</b>	<b>KODE</b>	<b>KETERANGAN</b>
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
	LA7	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
-Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
	LA11	Presentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
-Keberagaman dan Kesetaraan Peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
-Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
	LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
<b>SUB-KATEGORI : HAK ASASI MANUSIA</b>		
-Investasi	HR1	Jumlah total dan presentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia

<b>KATEGORI</b>	<b>KODE</b>	<b>KETERANGAN</b>
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk presentase karyawan yang dilatih
-Non Diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil
-Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
-Pekerja Anak	HR5	Operasi dan pemasok yang teridentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
-Pekerja Paksa Atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang teridentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
-Praktik Pengaman	HR7	Presentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi
-Hak Adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
-Asesmen	HR9	Jumlah total dan presentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia
-Asesmen Pemasok Atas Hak Asasi Manusia	HR10	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
<b>SUB-KATEGORI MASYARAKAT</b>		
-Masyarakat Lokal	SO1	Presentase operasi dengan pelibatan



<b>KATEGORI</b>	<b>KODE</b>	<b>KETERANGAN</b>
		masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
-Anti Korupsi	SO3	Jumlah total dan presentase operasi yang dinilai terhadap resiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
-Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
-Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
-Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan
-Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO9	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, di tangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
<b>SUB-KATEGORI : TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK</b>		
-Kesehatan Keselamatan Pelanggan	PR1	Presentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil
-Pelabelan	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait

KATEGORI	KODE	KETERANGAN
Produk dan Jasa		dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta presentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
	PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
-Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
	PR7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promisi dan sponsor, menurut jenis hasil
-Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
-Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

Sumber: *Global Reporting Initiative*

Item-item pengungkapan *corporate social responsibility* tersebut diukur dengan menggunakan CSR Index, yang diungkapkan dalam *Global Reporting Initiative (GRI)* dengan rumus sebagai berikut:

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j} \times 100\%$$

**Keterangan:**

*CSRI<sub>j</sub>* : *Corporate Social Responsibility Index* perusahaan j

*X<sub>ij</sub>* : 1= jika kriteria diungkapkan; 0 = jika kriteria tidak diungkapkan

*n<sub>j</sub>* : Jumlah kriteria pengungkapan *Corporate Social Responsibility* untuk perusahaan j,  $n_j \leq 91$

**2.1.5 Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu:

**Tabel 2.2****Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Varibel, Objek dan Periode Penelitian	Judul Peneltian	Hasil Penelitian
1.	Bustanul Arifin (2012)	Variabel Dependen : -Manajemen Laba Akrual -Manajemen Laba Riil Variabel Independen :	Perbedaan Kecenderungan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> :	<b>Manajemen Laba Akrual Berpengaruh Terhadap Pengungkapan</b>

No	Nama Peneliti (Tahun)	Varibel, Objek dan Periode Penelitian	Judul Peneltian	Hasil Penelitian
		<i>Corporate Social Responsibility</i>	Pengujian Terhadap Manajemen Laba Akrual dan Manajemen Laba Riil.	<i>Corporate Social Responsibility</i> <b>Manajemen Laba Riil Tidak Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility</b>
2	Sugeng Widodo (2017)	Variabel Dependen : <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel Independen : - Manajemen Laba Akrual - Manajemen Laba Riil	Pengaruh Manajemen Laba Akrual dan Manajemen Laba Riil Terhadap Kecenderungan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	<b>Manajemen Laba Akrual Tidak Berpengaruh terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility</b> <b>Manajemen Laba Riil Berpengaruh terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility.</b>
3.	Yateno (2016)	Variabel Dependen : Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Penguji Manajemen Laba Riil Pada Pengungkapan	<b>Manajemen Laba Riil Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap</b>

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel, Objek dan Periode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Variabel Independen : Manajemen Laba Riil	<i>Corporate Social Responsibility</i>	<b>Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i></b>
4.	Ni Luh Putri (2017)	Variabel Dependen : Pengungkapan - Manajemen Laba Akrual -Manajemen Laba Riil Variabel Independen : <i>Corporate Social Responsibility</i>	Intensitas Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> : Pengujian Dengan Manajemen Laba Akrual dan Manajemen Laba Riil	<b>Manajemen Laba Akrual Tidak Berpengaruh Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>, Manajemen Laba Riil Berpengaruh Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i></b>
5.	Lau, Serlina (2017)	Variabel Dependen : <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel Independen : Manajemen Laba Riil	Pengaruh Manajemen Laba Riil terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	<b>Manajemen Laba Riil Tidak Berpengaruh Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i></b>
6.	A Irwan (2014)	Variabel Dependen : <i>Corporate Social Responsibility</i>	Dampak Manajemen Laba Akrual dan Real	<b>Manajemen Laba Akrual Tidak Berpengaruh</b>

No	Nama Peneliti (Tahun)	Varibel, Objek dan Periode Penelitian	Judul Peneltian	Hasil Penelitian
		Variabel Independen : Manajemen Laba Akrual Manajemen Laba Riil	Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	<b>Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>, Manajemen Laba Riil Berpengaruh Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i></b>

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Praktik pengungkapan *Corporate Social Responsibility* memainkan peran penting bagi perusahaan. Karena perusahaan berada dalam lingkungan masyarakat dan kemungkinan aktivitasnya memiliki dampak sosial dan lingkungan. Dengan adanya pngungkapan *Corporate Social Responsibility*, diharapkan perusahaan mamou memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan serta dukungan dari stakeholders agar dapat mendukung perusahaan alam pencapaian tujuan, yaitu stabilitas dan jaminan *going concern*.

Berikut akan dijelaskan mengenai kerangka pemikiran yang diperkuat dengan teori penghubung yang berhungan dengan variabel independen dan variabel dependen.

### **Pengaruh Manajemen Laba Akrual Terhadap *Corporate Social Responsibility***

Teknik manajemen laba akrual cenderung lebih mudah dideteksi oleh auditor maupun regulator hingga mampu menyebabkan kebangkrutan maupun kasus hukum. Untuk mengalihkan perhatian stakeholders terkait dengan manajemen laba yang dilaksanakan perusahaan, perusahaan akan menggunakan strategi agar keberadaan perusahaan tetap mendapatkan legitimasi dengan cara melakukan tindakan tanggung jawab sosial. Semakin baik kinerja lingkungan sebuah perusahaan maka akan semakin banyak pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik akan melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang lebih luas. Hal ini dinilai mampu untuk memberikan citra yang baik untuk perusahaan sehingga mendapatkan respon yang positif dari berbagai pihak termasuk *stakeholders*.

Menurut Bustanul (2012) bahwa :

“Jika perusahaan melakukan manajemen laba akrual yang tinggi, maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pun akan semakin tinggi. Variabel manajemen laba akrual berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, artinya bahwa perusahaan yang melakukan manajemen laba akrualnya tinggi maka perusahaan akan semakin lebih banyak mengungkapkan *corporate social responsibility* (CSR). Dalam hal ini mengungkapkan adanya pengaruh manajemen laba akrual yang diproksi dengan discretionary accruals terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”.

Menurut A irwan (2014) bahwa :

“Salah satu konsekuensi dari tindakan manajemen yang memanajemen laba akrual adalah perusahaan akan kehilangan dukungan dari *stakeholders*, yakni respon negatif berupa tekanan dari investor, sanksi dari regulator, ditinggalkan rekan kerja, boikot dari para aktivis, dan

pemberitaan negatif media massa. Manajer perusahaan melakukan strategi pertahanan diri untuk mengatasi ketidakpuasan stakeholder dan salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pengungkapan pertanggung jawaban sosial perusahaan. Tindakan manajer dalam melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* menjadi pertahanan diri dalam melakukan manajemen laba akrual”.

Menurut Ni Luh Putri (2017) bahwa :

“Berdasarkan hasil penelitian ini, tidak berpengaruhnya manajemen laba akrual pada intensitas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat dilihat melalui nilai rata-rata *discretionary accrual* (DA) yang bernilai negatif. Nilai negatif dari DA mengindikasikan adanya pola *income minimization* (penurunan laba). Pola penurunan laba ini dapat diindikasikan sebagai adanya penurunan kinerja oleh perusahaan, menurunnya kinerja perusahaan tidak memberikan sinyal yang baik bagi stakeholder. Sehingga stakeholder tidak memiliki ekspektasi yang tinggi bagi perusahaan dan perusahaan merasa tidak memerlukan untuk mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* untuk menyembunyikan tindakan kecurangan berupa rekayasa laba yang dilaksanakan perusahaan. Oleh karenanya, dapat dinyatakan bahwa manajemen laba akrual tidak memengaruhi intensitas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”.

### **Pengaruh Manajemen Laba Riil Terhadap *Corporate Social Responsibility***

Motivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba riil karena adanya tekanan maupun dorongan manajemen untuk meningkatkan laba jangka pendek serta rendahnya fokus manajemen terhadap rencana jangka panjang perusahaan. Perilaku oportunitas manajemen memfokuskan kepada aktivitas-aktivitas yang dapat mempengaruhi laba. Oleh karena itu manajemen yang melakukan manajemen laba menggunakan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebagai upaya untuk menggalang dukungan dari pada *stakeholders*.



Menurut Yateno (2016) bahwa :

“penelitian ini memberikan bukti bahwa manajemen laba riil berpengaruh positif signifikan terhadap corporate social responsibility. Perusahaan yang menunjukkan pengungkapan CSR merekayasa laba melalui aktivitas operasional perusahaan dan mengungkapkan pertanggungjawaban sosial untuk strategi pertahanan diri (*entachment strategy*) dalam mengantisipasi ketidakpuasan *stakeholder*”.

Menurut Ni Luh Putri (2017) bahwa :

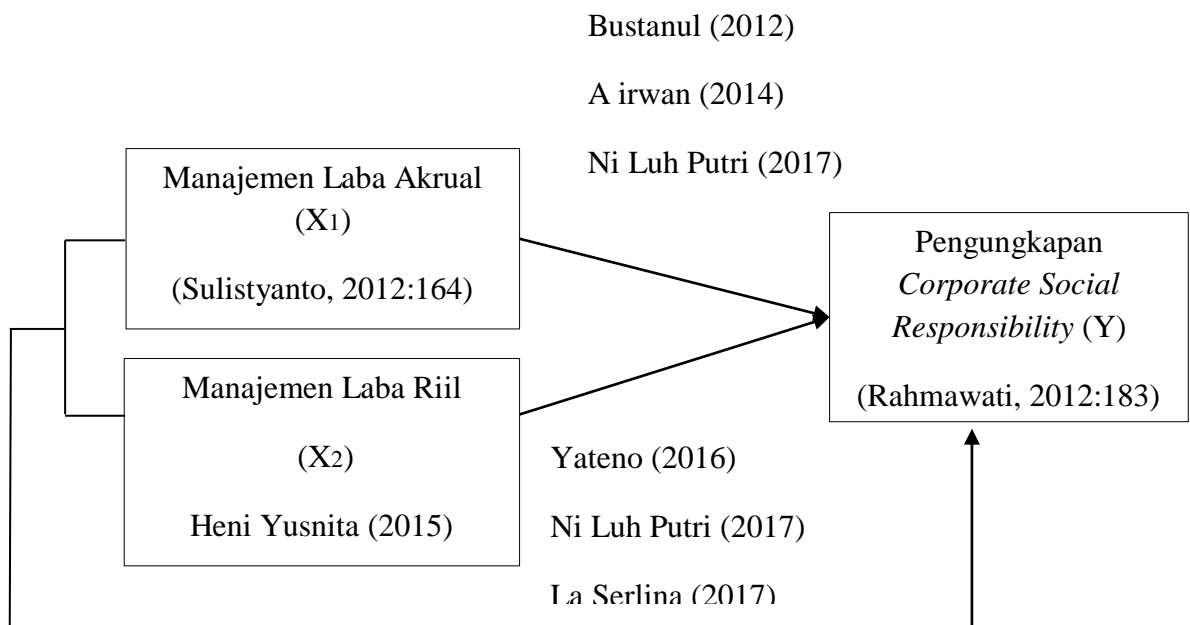
“Manajemen laba riil sebagai salah satu teknik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan secara empiris terbukti memiliki pengaruh positif pada intensitas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. manajemen laba riil meskipun tergolong sebagai salah satu teknik manajemen laba yang cukup mahal, teknik ini lebih sukar untuk dideteksi oleh auditor dan regulator. Selain dikarenakan teknik ini lebih sukar untuk dideteksi, adanya pergeseran paradigma dimana manajemen cenderung lebih bersedia terlibat dalam teknik manajemen laba riil dibandingkan akrual. Manajemen laba riil meskipun tergolong cukup sulit dideteksi oleh regulator maupun auditor, namun ketika kasus tersebut terungkap ke publik dapat menghancurkan reputasi manajer bahkan reputasi perusahaan”.

Menurut La Serlina (2017) bahwa :

“Manajemen laba riil dengan tiga proksi ( arus kas operasi abnormal, biaya produksi abnormal, dan biaya diskresioner abnormal) menunjukkan bahwa arus kas operasi abnormal dan biaya diskresioner abnormal tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, yang berarti bahwa peningkatan atau penurunan tingkat kepatuhan tidak dipengaruhi oleh arus kas operasi abnormal dan biaya diskresioner abnormal. Hal ini dikarenakan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terjadi manajemen laba riil melalui arus kas operasi abnormal dan biaya diskresioner abnormal dalam periode pengamatan karena indikasi manajemen laba riil ketika keduanya bernilai negatif, sedangkan manajemen laba riil melalui biaya produksi abnormal berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang berarti perusahaan di Indonesia cenderung meningkatkan laba melalui peningkatan produksi salah satunya berdampak pada meningkatnya tingkat kepatuhan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”.

Berbagai penelitian terkait dengan pengungkapan *corporate social responsibility* menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya hubungan positif dan ada juga yang negatif.

Sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh Manajemen Laba Akreal dan Manajemen Laba Riil Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*” maka model kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut. Maka hipotesis dari penelitian dalam penelitian ini adalah :

Hipotesis 1 : “Terdapat Pengaruh Manajemen Laba AkruaI Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”.

Hipotesis 2 : “Terdapat Pengaruh Manajemen Laba Riil Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”.

Hipotesis 3 : “Terdapat Pengaruh Manajemen Laba AkruaI dan Manajemen Laba Riil Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”.